
ARTICLE

Evaluasi *Context* Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandar Lampung

Amanda Bella Puspita^{1*}, Meiliyana², dan Anisa Utami³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung, JL. Prof. Dr. Ir. Sumantri. Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Puspita, A.B., Meiliyana., Utami, A., (2025). Evaluasi *Context* Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandar Lampung. *Administrativa* 7 (1)

Article History

Received: 16 Oktober 2024

Accepted: 8 Januari 2025

Keywords:

Program Evaluation,
Child Identity Card,
CIPP Model

ABSTRACT

This study aims to evaluate the context of the implementation of the Child Identity Card (Kartu Identitas Anak/KIA) Program in Bandar Lampung City. The KIA program is a national policy intended to provide official identification for children under the age of 17. It is expected to support population data collection, enhance child protection, and facilitate children's access to public services. However, as of 2024, the KIA ownership rate in Bandar Lampung has only reached 68.8%, still below the national target of 75%. Moreover, the benefits of the program have not been fully realized by the community, particularly in terms of using the KIA for administrative and public service purposes. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and document analysis. The study focuses on the context aspect of the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product) developed by Stufflebeam (1966). This aspect is used to assess whether the program was designed based on the actual needs of the community and is relevant to local conditions. The findings indicate that program planning has not been carried out comprehensively, the urgency and benefits of the KIA program are not yet fully understood by the public, and the program's objectives do not entirely reflect the needs of children at the local level. These findings highlight that context is a crucial factor that needs to be improved to support the success of the KIA program in Bandar Lampung City.

Kata Kunci:

Evaluasi Program,
KIA,
Model CIPP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konteks implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandar Lampung. Program KIA merupakan kebijakan nasional yang ditujukan untuk memberikan identitas resmi kepada anak-anak di bawah usia 17 tahun. Program ini diharapkan dapat mendukung pendataan kependudukan, meningkatkan perlindungan anak, serta mempermudah akses anak terhadap berbagai pelayanan publik. Namun, hingga tahun 2024, capaian kepemilikan KIA di Kota Bandar Lampung baru mencapai 68,8%, masih berada di bawah target nasional sebesar 75%. Selain itu, manfaat dari program ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal pemanfaatan KIA untuk berbagai keperluan administratif dan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Fokus utama diarahkan pada aspek context dalam model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1966). Aspek ini digunakan untuk menilai sejauh

* Corresponding Author

Email : amandabellapuspita29@gmail.com

mana program dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan relevan dengan kondisi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program belum dilakukan secara komprehensif, urgensi dan manfaat KIA belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, serta tujuan program belum seluruhnya mencerminkan kebutuhan anak-anak di tingkat lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa konteks merupakan aspek krusial yang perlu diperbaiki untuk mendukung keberhasilan program KIA di Kota Bandar Lampung.

A. PENDAHULUAN

Identitas kependudukan merupakan salah satu hak dasar yang penting bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak. Memiliki identitas resmi memungkinkan anak untuk diakui secara hukum, mendapatkan perlindungan, dan mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang tertuang dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Program ini bertujuan untuk memberikan identitas kependudukan resmi kepada anak di bawah usia 17 tahun yang belum menikah, serta mendukung pendataan, perlindungan anak, dan pelayanan publik. Di Kota Bandar Lampung, pelaksanaan program KIA telah berjalan sejak 2016. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa cakupan kepemilikan KIA belum mencapai target nasional sebesar 75%. Pada tahun 2024, angka kepemilikan baru mencapai 68,8%, yang berarti masih banyak anak yang belum terdata dalam sistem KIA. Dalam website (<https://nasional.kontan.co.id> diakses pada 1 september 2024) Kemendagri targetkan cakupan kepemilikan KIA 75% pada tahun 2024.

Tabel 1. Realisasi cakupan kepemilikan KIA di Kota Bandar Lampung

Tahun	Jumlah anak wajib KIA 0-17 tahun	Memiliki KIA	Belum memiliki KIA	Persentase kepemilikan KIA
2022	293.366	153.301	140.065	52,2%
2023	308.668	177.787	130.881	57,6%
2024	314.364	216.359	98.005	68,8%

Sumber: Dispendukcapil Kota Bandar Lampung, 2025

Selain itu, manfaat program ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Rendahnya pemahaman orang tua terhadap fungsi dan pentingnya KIA menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat masih terbatas, sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara optimal. kebanyakan masyarakat Kota Bandar Lampung yang sudah memiliki KIA tetapi tidak mengetahui nilai guna KIA, sehingga nilai guna KIA belum optimal dimanfaatkan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1966). Model ini digunakan karena mampu mengevaluasi program secara menyeluruh mulai dari perumusan hingga pelaksanaan dan hasilnya. Pada artikel ini, fokus diarahkan pada aspek *context* atau konteks program. Evaluasi konteks dilakukan untuk mengetahui latar belakang, kebutuhan, serta alasan utama mengapa program tersebut dijalankan. Dengan mengevaluasi konteks, dapat dilihat apakah program KIA disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang efektif.

Pemilihan fokus pada aspek *context* dalam penelitian ini didasarkan pada pentingnya memahami latar belakang dan kebutuhan masyarakat sebelum suatu program dijalankan.

Evaluasi konteks membantu menilai apakah Program KIA benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung dan apakah tujuan program sudah sesuai dengan kondisi yang ada. Jika sejak awal program tidak dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, maka pelaksanaannya berisiko tidak efektif. Oleh karena itu, mengevaluasi konteks menjadi langkah awal yang penting untuk mengetahui seberapa relevan program ini bagi masyarakat dan seberapa besar potensi keberhasilannya ke depan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Dye (1995), kebijakan publik mencakup segala hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dengan kata lain, setiap tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak bertindak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik. Pandangan ini menegaskan bahwa kebijakan publik bersifat fleksibel, karena mencakup baik intervensi langsung maupun sikap pasif pemerintah terhadap suatu isu. Sementara itu, Wilson dalam Maulana dan Nugroho (2019) mengemukakan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan, tujuan, serta pernyataan resmi pemerintah terkait suatu persoalan, termasuk langkah-langkah yang telah, sedang, atau bahkan gagal dilaksanakan. Pandangan ini menyoroti bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan yang berhasil dilakukan, tetapi juga mencakup upaya atau niat yang belum terwujud.

Evaluasi

Stufflebeam dan Coryn (2014) menjelaskan bahwa evaluasi mencakup kegiatan merencanakan, memperoleh, menyampaikan, dan memanfaatkan informasi yang bersifat deskriptif, dengan mempertimbangkan manfaat, nilai penting, serta integritas dari objek yang dievaluasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, memberikan dukungan, menyebarluaskan praktik-praktik yang efektif, serta memperdalam pemahaman terhadap berbagai fenomena yang berkaitan. Sementara menurut Menurut Gredler (1996) dalam Wirawan (2011), evaluasi merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan proses pengumpulan informasi.

Kesimpulannya, kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada pengumpulan informasi, tetapi juga pada pemanfaatan informasi tersebut secara strategis untuk mendukung keputusan, meningkatkan kualitas program, dan memperluas wawasan terhadap proses yang terjadi.

Evaluasi Program

Menurut Wirawan (2011), evaluasi program merupakan suatu metode yang dilakukan secara sistematis untuk menghimpun, menganalisis, dan memanfaatkan informasi guna menjawab pertanyaan-pertanyaan utama terkait program. Proses ini dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi secara ilmiah, yang hasilnya dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam memilih alternative kebijakan yang tepat. Adapun model evaluasi program dalam penelitian ini adalah:

- a. Evaluasi konteks (*context evaluation*): evaluasi ini mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program.
- b. Evaluasi masukan (*input evaluation*): evaluasi ini mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan.
- c. Evaluasi proses (*process evaluation*): Evaluasi proses digunakan untuk menelaah sejauh mana rencana yang sudah diterapkan termasuk menelaah permasalahan prosedur tentang pelaksanaan program.

- d. Evaluasi produk (*product evaluation*): mengidentifikasi hasil, dampak dan manfaat dengan menilai kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan yang ditargetkan.

Pada penelitian ini, peneliti akan menekankan dan mengkaji lebih dalam mengenai indikator konteks, untuk melihat dan mengidentifikasi kesesuaian kebutuhan masyarakat terhadap program KIA.

Kartu Identitas Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Pasal 1 ayat 7, KIA merupakan identitas resmi anak yang berfungsi sebagai bukti pengenal bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten atau kota. Penerbitan KIA oleh pemerintah bertujuan untuk memperkuat proses pendataan, meningkatkan perlindungan, serta memperluas akses pelayanan publik. Selain itu, KIA juga menjadi bagian dari upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional setiap warga negara. Dengan memastikan setiap anak memiliki identitas melalui KIA, diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendataan, perlindungan, dan layanan publik demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak-anak di Indonesia.

C. METODE

Penelitian yang dilakukan memakai metode kualitatif menerapkan skema deskriptif. Fokus dari penelitian yang dilakukan yaitu evaluasi program kartu identitas anak (KIA) di Kota Bandar Lampung dengan teori CIPP Stufflebeam (1966) dengan fokus pada indikator *context* guna meninjau sejauh mana tujuan dan urgensi program KIA ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian ini berfokus di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang mana merupakan tempat dilaksanakannya implementasi kebijakan pengurusan kartu identitas anak tersebut, dan dengan tempat terkait lainnya seperti Kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Bandar Lampung, Rumah Sakit Ibu dan Anak Santa Anna, Gramedia Bandar Lampung, SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung, SMPN 5 Bandar Lampung, SMAN 10 Bandar Lampung, Kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Bandar Lampung, Stasiun Tanjung Karang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bandar Lampung, dengan bentuk data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder, serta dengan metode pemilihan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, untuk cara analisis data yang dipakai yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek *context* dalam model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) bertujuan untuk mengidentifikasi serta memahami urgensi dan latar belakang perlunya pelaksanaan program KIA di Kota Bandar Lampung. Selain itu, Stufflebeam (1966) dalam Wirawan (2011) menyatakan evaluasi ini juga dimaksudkan untuk menilai sejauh mana tujuan program KIA selaras dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat, khususnya kebutuhan administrasi kependudukan bagi anak-anak.

Melalui indikator *context* ini, peneliti menitikberatkan analisis pada aspek perencanaan program KIA, termasuk bagaimana program tersebut dirancang oleh instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, evaluasi konteks ini menjadi fondasi penting untuk mengetahui apakah program KIA

dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan apakah tujuan yang ingin dicapai telah mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan. Hasil dari evaluasi konteks ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai relevansi program, serta menjadi acuan dalam menentukan keberlanjutan implementasi program KIA di masa mendatang.

Perencanaan Program KIA di Kota Bandar Lampung

Pramono (2020) menyatakan perencanaan yang kurang tepat dalam implementasi akan menyebabkan kebijakan tersebut gagal untuk diimplementasikan, sehingga perlu adanya arah perbaikan pada kebijakan yang sedang diimplementasikan. Perencanaan dalam pelaksanaan program publik merupakan titik krusial yang menentukan arah keberhasilan atau kegagalan implementasi di lapangan. Dalam kasus Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandar Lampung, perencanaan memang telah dilakukan melalui Rencana Kerja Tahunan (Renja) Disdukcapil.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi lapangan, pelaksanaan perencanaan menunjukkan adanya ketimpangan antara strategi yang tertulis dengan realisasi konkret. Misalnya, meskipun strategi jemput bola (jembol) telah dirancang sebagai bentuk inovasi layanan, dalam praktiknya belum melibatkan sekolah-sekolah menengah pertama dan ke atas dan institusi layanan publik lainnya secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor. Padahal, sinergi antara Disdukcapil dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lembaga pelayanan publik lainnya sangat penting untuk menciptakan efek integratif yang memperkuat posisi KIA di tengah masyarakat. Berikut renja Disdukcapil Kota Bandar Lampung 2024:

Tabel 2. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kerja Tahun 2024
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan
Koordinasi antar Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk
Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil
Fasilitas terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Sumber: LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2024.

Kelemahan dalam koordinasi ini berdampak langsung pada rendahnya efektivitas perencanaan. Misalnya, ketika sekolah tidak dilibatkan dalam tahap awal perencanaan, maka secara otomatis sosialisasi kepada orang tua murid pun tidak akan berjalan optimal. Akibatnya, masyarakat hanya mengenal program KIA secara pasif ketika mereka harus mengakses layanan tertentu, bukan sebagai bentuk kesadaran administratif yang tumbuh dari dalam. Selain itu, strategi komunikasi publik yang diterapkan juga dinilai kurang tepat sasaran. Media yang digunakan masih didominasi oleh pendekatan satu arah seperti banner, leaflet, dan website pemerintah. Masyarakat kelas bawah atau mereka yang tinggal di daerah pinggiran cenderung tidak terpapar dengan medium informasi ini. Padahal, forum RT, kegiatan PKK, dan posyandu merupakan ruang komunikasi sosial yang efektif untuk menyampaikan informasi terkait program kependudukan. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat juga rendah sehingga menjadi tantangan pada tahap perencanaan, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Margono (2018) mengidentifikasi bahwa tantangan internal dalam perencanaan program adalah rendahnya partisipasi masyarakat terhadap suatu program. Sadiawati dkk (2019) dalam bukunya menyatakan tanpa perbaikan dalam proses

perencanaan, program pemerintah tersebut beresiko tidak efektif dan dapat dicabut. Sehingga perlu perbaikan pada tahap perencanaan ini, terutama pada pengoptimalan rencana kerja tahunan. Kritik yang dapat diajukan terhadap perencanaan program KIA adalah orientasinya yang cenderung pada capaian kuantitatif, yaitu persentase anak yang memiliki KIA. Tidak ada indikator evaluatif terkait peningkatan pemahaman masyarakat, kebermanfaatan dokumen, atau peningkatan akses layanan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap outcome perencanaan masih sangat terbatas.

Dalam konteks teori evaluasi CIPP yang dikembangkan Stufflebeam (1966), seharusnya perencanaan tidak hanya menekankan apa yang akan dicapai (*output*), tetapi juga mengapa dan bagaimana hal tersebut perlu dilakukan (*context*). Oleh karena itu, perencanaan KIA di Kota Bandar Lampung sebaiknya dirumuskan ulang dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, serta didasarkan pada hasil analisis kebutuhan masyarakat secara komprehensif (*need assessment*). Perencanaan seharusnya dimulai dari basis data yang kuat, diikuti oleh proses konsultatif yang partisipatif, dan menghasilkan dokumen kebijakan yang responsif terhadap dinamika lokal. Namun, proses ini belum sepenuhnya terjadi dalam perencanaan KIA.

Kesesuaian Tujuan Terhadap Kebutuhan

Salah satu prinsip penting dalam evaluasi konteks adalah menilai sejauh mana sebuah program publik menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks Program KIA, secara normatif tujuan program sangat ideal, yaitu memberikan identitas resmi kepada anak-anak, memperkuat perlindungan anak, dan meningkatkan akses terhadap layanan publik. Namun, realisasi tujuan tersebut di Kota Bandar Lampung masih belum optimal, karena terdapat jarak antara ekspektasi pemerintah dan realitas sosial di masyarakat

Sebagian besar masyarakat masih belum melihat urgensi kepemilikan KIA, karena dokumen tersebut belum digunakan sebagai syarat utama dalam berbagai layanan publik. Akta kelahiran dan kartu keluarga masih menjadi rujukan utama dalam berbagai urusan administrasi. Bahkan dalam pendaftaran sekolah dan BPJS Kesehatan, KIA tidak disebutkan sebagai persyaratan wajib. Masalah ini diperparah dengan tidak adanya peraturan turunan di tingkat daerah yang memperkuat pemanfaatan posisi KIA. Situasi ini menciptakan persepsi publik bahwa program KIA bersifat simbolik dan tidak memberikan manfaat langsung. Ini menjadi persoalan persepsi manfaat (*perceived benefit*) yang rendah, padahal persepsi inilah yang menentukan tingkat adopsi masyarakat terhadap suatu inovasi kebijakan. Hal ini sejalan juga dengan hasil penelitian Agustin (2024) menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang menganggap KIA tidak penting karena identitas anak sudah tercatat dalam akta kelahiran. Berikut dokumentasi syarat pendaftaran sekolah dan BPJS Kesehatan di Kota Bandar Lampung:

PERSYARATAN PENDAFTARAN BARU PESERTA BPJU / MANDIRI	
NO	Kelengkapan
1	Kartu Keluarga
2	KTP
3	Buku rekening tabungan BNI/BRI/Mandiri/BCA/BSI/BTN

*Dapat menggunakan rekening tabungan Kepala Keluarga/anggota keluarga dalam KK/penanggung

PENTING DIKETAHUI: Agar pendaftaran dapat diproses lebih lanjut, pastikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah sesuai dan lengkap.

luran Kelas I	: Rp. 150.000,-/orang
Kelas II	: Rp. 100.000,-/orang
Kelas III	: Rp. 35.000,-/orang (sudah termasuk subsidi pemerintah)

Gambar 1. Syarat Pendaftaran Sekolah dan BPJS Kesehatan
Sumber : Dokumentasi peneliti, 2025 (BPJS Kesehatan dan website SDN 1 Sukabumi)

Dokumentasi tersebut mempertegas bahwa KIA tidak menjadi syarat wajib pendaftaran sekolah, berdasarkan Flyer tersebut diketahui syarat umum pendaftaran sekolah antara lain: Akta Kelahiran, KK, KTP ortang tua, SKL, Ijazah, dan pas photo berwarna. Dan tidak menjadi syarat wajib dalam pendaftaran BPJS Kesehatan pada anak-anak.

Persoalan fungsionalitas juga muncul ketika KIA tidak diintegrasikan dalam sistem perlindungan anak. KIA tidak memiliki chip seperti KTP sehingga fungsi KIA dalam perlindungan anak hanya sebagai dokumen identifikasi. Ketika ada hal buruk yang terjadi pada anak-anak. Tanpa integrasi ini, KIA tidak memiliki nilai strategis dalam kebijakan perlindungan anak. Ini menjadi bukti bahwa tujuan program belum menyentuh aspek kebutuhan multi dimensional Masyarakat. Sebagai solusi, seharusnya program ini dilengkapi dengan fungsi tambahan yang menarik dan relevan bagimasyarakat, seperti memperluas diskon pada layanan publik, kemudahan administrasi pendidikan, atau kemitraan dengan sektor swasta seperti pusat perbelanjaan dan klinik kesehatan. Pemberian insentif akan membentuk ekosistem kebijakan yang mendorong masyarakat untuk melihat KIA sebagai kebutuhan, bukan kewajiban administratif semata. Simamora (2022) menyatakan pengambil kebijakan publik harus dapat merancang agenda pembangunan dengan visi jangka panjang. pemerintah perlu mempertegas fungsinya dalam regulasi sebagai dokumen utama yang wajib jika memang program ini dipertahankan.

Lebih lanjut, pendekatan yang dapat digunakan adalah *policy co-design*, yaitu penyusunan kebijakan yang melibatkan langsung pengguna akhir (masyarakat) dalam proses perumusan. Dengan demikian, program dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi warga. Ini sejalan dengan model *adaptive governance* dalam kebijakan publik modern, di mana fleksibilitas, keterbukaan, dan kolaborasi menjadi prinsip utama. Untuk memperbaiki situasi ini, perlu ada reformulasi tujuan program agar lebih kontekstual dan operasional. Tujuan tidak hanya cukup dirumuskan dalam kalimat ideal, tetapi juga harus diturunkan menjadi langkah-langkah strategis yang dapat diukur dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Integrasi lintas sektor menjadi kunci utama, karena anak sebagai sasaran program berada dalam interseksi antara dunia pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Jika tujuan program tidak direvisi dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan nyata, maka risiko stagnasi program akan terus berlanjut. KIA akan tetap menjadi dokumen tambahan yang hanya dipenuhi jika ada tekanan dari pihak sekolah atau pemerintah, bukan atas dasar kebutuhan riil dari masyarakat.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konteks implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek perencanaan dan kesesuaian tujuan program dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan program belum sepenuhnya partisipatif dan belum melibatkan lintas sektor secara optimal, sehingga pelaksanaannya tidak merata dan kurang responsif terhadap kondisi masyarakat. Selain itu, manfaat KIA belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat karena tidak terintegrasikan dalam sistem layanan publik yang penting seperti pendidikan dan kesehatan, serta belum diperkuat oleh regulasi tentang kewajiban penggunaannya. Akibatnya, tingkat partisipasi dan kepemilikan KIA masih di bawah target nasional.

Saran

Pemerintah daerah, khususnya pelaksana Disdukcapil perlu memperbaiki strategi perencanaan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan instansi lintas sektor agar program lebih kontekstual dan inklusif. Penguatan regulasi, seperti peraturan wali kota atau surat edaran yang mewajibkan penggunaan KIA dalam layanan publik, sangat diperlukan untuk meningkatkan urgensi program. Selain itu, perlu dilakukan inovasi manfaat praktis bagi pemilik KIA, seperti integrasi dengan layanan prioritas atau insentif langsung, agar masyarakat lebih terdorong untuk memiliki dan memanfaatkan dokumen ini secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, L. (2022). *Kemendagri Targetkan 75% Anak Indonesia Memiliki KIA pada 2024*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kemendagri-targetkan-75-anak-aka-nak-memiliki-kia-pada-2024>. Diakses pada 14 Desember 2024
- Dewi, N.R. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 10 (1), 9–13. <https://doi.org/10.33592/jiia.v10i1.525>
- Dye, T. R. 1995. *Understanding public policy by Thomas R. Dye*. New Jersey: Prentice Hall
- Gultom, D.N., dkk (2023). Peran Humas Pemerintah terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak di Kota Batam (The Role of Government Public Relations in Increasing Public Awareness in Paying Taxes in Batam City). *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*. 3(1)
- Margono, A. (2019). Tantangan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Di Pelosok Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(1), 38-51.
- Maulana & Nugroho (2019). *Kebijakan Publik*. Serang: CV. AA. RIZKY
- Melinda, Mdkk. (2024). Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Perspektif Siyāḥ Tanfīz. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*. 1(4). <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i4.47>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
- Sadiawati, D, dkk. 2019. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. Jakarta : Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK)
- Stufflebeam & Coryn. 2014. *Evaluation : Theory, Model, Application*. San Francisco, CA : Whilley
- Wirawan, 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.